

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Basyir, Ahmad Azhar. 2019. *Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosmita, Emi et.al. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- S, Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- SM, Wasiaatmadja. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetika Medik*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- W, Adisasmito. 2008. *Sistem Kesehatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yuliardila. 2015. “*Hubungan Kualitas Layanan Dengan Loyalitas Consumen*”. Medan: UMA

Skripsi dan jurnal

- Alfian, Ian. 2017. *"Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan."*
- Anwar, Muhammad. 2020. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12 No. 2.
- Asirah, A. 2023. *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar*. *Jurnal Law Review*. Vol. 4 No. 2.
- Has, Muhammad Faizal. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam*. Parepare.
- HTP, Efrida Mayang Sari. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Pekanbaru.
- Hura, Serfinawati. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Oleh BBPOM Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Medan)*. Medan.
- L.V., Mamoto Citraningtyas, F.G. 2013. *Analisis Rhodamin B Pada Lipstik yang Beredar di Pasar Kota Manado*. *Jurnal Ilmiah Farmasi*.
- Lubis, Drs. Azwani. Heri Firmansyah, Nazlyany Hasibuan. 2021. *Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Studi Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaanya)*. Vol. 06, No. 01. Sumatera.
- Muhlis, Lisa Nursyahbani. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*. Makassar.
- Mulyani, Desy Putri. 2020. *Penerapan Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya*. Surakarta.
- N., Fitriani. 2021. "Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Kosmetika Ilegal," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nusantara*. Vol. 7 No. 1.
- Natah, Marwanto. Luh Cahaya Bungan. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya". Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*.
- Nelawan, Audy. *Jurnal Ilmiah*. "Pengaturan Hukum Pengamana dan Penggunaan Sediaan Farmasi, *Lex et Societatis*". Vol. III/No. 10/Nov/2015.

- Nuryani, Ani. 2024. *Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Ratna Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)*. Magetan.
- Pitri, Adek. 2019. "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) di Kota Pekanbaru". Volume 6, Edisi I Januari – Juni.
- Puspitasari, Rina. 2022. "Tinjauan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Lex Et Societatis* Vol. XI. No. 2.
- R., Sulastri. 2020. "Sinkronisasi Standar BPOM dan MUI dalam Pengawasan Kosmetika" *Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol. 8 No. 2
- Rahmi, Fadlil. 2022. *Pengaruh Label Halal Mui Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Product Cosmetic (Di Kalangan Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)*. Riau.
- Rena, Dhana Febi. 2019. Tesis: "*Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online oleh BPOM*". Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rumagit, Jennifer Oktaviana. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya* artikel: *Jurnal Lex Privatum* Vol XII/03/November/2023.
- S., Luthfiah. 2020. *Penegakan Hukum terhadap Kosmetik Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Supriyatini. 2021. *Penertiban Perdagangan Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pekanbaru*.
- Verz, Zylvia Arisna. 2021. *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada BBPOM Di Medan)*.
- Windari. 2015. *Perdagangan Dalam Islam, Al Masharif*. Vol.3 No.2.
- Yuliardila. 2015. "*Hubungan Kualitas Layanan Dengan Loyalitas Consumen*". Medan: UMA

Undang-Undang Dan Dasar Hukum

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 2019. *Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia*. Jakarta: BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan*. Jakarta: BPOM RI.

Badan POM RI. 2023. *Pedoman Pengawasan Kosmetika dan Pangan Olahan Tahun 2023*. Jakarta: BPOM RI.

Badan POM RI. *Aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile untuk Pemeriksaan Legalitas Produk*. diakses melalui <https://cekbpom.pom.go.id>

Badan POM RI. *Aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile untuk Pemeriksaan Legalitas Produk*. dari <https://cekbpom.pom.go.id>

BPOM RI. 2008. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Rhodamin B (Rhodamine B). Jakarta: BPOM.

BPOM RI. 2023. *Cyber Patrol dan Sistem Pengawasan Digital Produk Obat dan Makanan*. Jakarta: Pusat Data BPOM.

BPOM RI. 2023. *Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)*.

BPOM RI. 2023. *Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Aman*.

BPOM RI. 2025. *Siaran Pers: BPOM Ungkap 39.642 Tautan Produk Ilegal di Media Daring*. Jakarta: 30 April.

BPOM RI. 2025. *Siaran Pers: Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal*. Jakarta: 21 Februari.

BPOM RI. *Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengawasan Peredaran Kosmetika*.

BPOM RI. *Peraturan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar*. Pasal 3.

Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Jakarta: Pusat Bahasa Edisi Keempat.

Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. 2024. *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023* Jakarta: BPOM RI.

https://kediri.pom.go.id/berita/balai-pom-kediri-gandeng-kadin-hipmi-dan-hipmikindo-untuk-permudah-legalitas-produk-umkm-di-kota-kediri?utm_source=chatgpt.com.

Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Majelis Ulama Indonesia. 2013. *Fatwa Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan makanan Nomor 12 Tahun 2020.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyidikan di Lingkungan BPOM.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010, Pasal 2 ayat 1 dan 2

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 445/Menkes/Peemenkes/1998. pasal 1 ayat 1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 4 dan Pasal 5.

SIARAN PERS “Kampanye Cerdas Gunakan Kosmetik untuk Generasi Milenial” – BPOM RI.

Siaran Pers BPOM RI. 2024. *BPOM Bersama Kominfo Tutup Ribuan Akun Penjual Produk Kosmetik Ilegal di Marketplace*.

Siaran Pers BPOM. 2024. *BPOM Bersama POLRI dan TNI Sita Ratusan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Jawa Timur.*

Undang-Undang No. 8 tahun 1991, pasal 8 ayat 1 huruf a sampai j.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.